

EFEKTIFITAS DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BERBASIS AKUNTANSI AKRUAL YANG DIMODIFIKASI DI INDONESIA

Faris Mahdi¹

ABSTRACT

Indonesian Local Governments have to finance their activities from their own effort. Realizing that there are many wealthy regions, but not slightly un-wealthy regions, it is important to think about effectiveness and accountability for Local Government to manage their asset to bring into real wealthy community.

This article tries to give a few perspectives how to manage income for Local Government. It gives explanation about definition of income for Local Government, how they should be got and how they should be recorded under accrual base to become accountable, and how they should be used to measure effectiveness of Local Government activities.

Keywords: Local Government, income, accrual, autonomy.

Tolok ukur penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas dan pelaporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu organisasi internasional yang mempunyai komitmen meningkatkan dan mengembangkan program pengelolaan keuangan sektor publik - dalam hal ini adalah pemerintah daerah (Pemda) - serta meningkatkan akuntabilitas sektor publik adalah *International Federation of Accountants (IFAC)*.

Pada Desember 1996, IFAC menerbitkan hasil studi yang bertemakan pengertian dan pengakuan pendapatan yang menggali secara mendalam tentang pengertian dan pengakuan pendapatan, dampak dari perbedaan dasar basis akuntansi, dan beberapa isu dan permasalahan yang menyertai tipe-tipe pendapatan. Selanjutnya, berdasarkan studi IFAC tersebut akan dipaparkan cara penggalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Informasi atas pendapatan sangat penting dalam membantu pengguna - dalam hal ini badan pengawas (DPRD) dan badan pemeriksa (BPK) - untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja Pemda. Pendapatan dan pengeluaran dapat dibandingkan untuk membantu pengguna menilai ekuitas atau modal Pemda antar periode waktu. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah pendapatan saat ini mencukupi untuk membiayai program dan jasa yang akan disediakan atau dilaksanakan pada periode anggaran yang berjalan. Selanjutnya, Pemda menghadapi permasalahan pengukuran yang khusus sehingga berbeda dengan sektor swasta dalam mengenali atau mengakui pendapatan.

METODA AKUNTANSI

Pemda menghadapi ketentuan berbeda dalam menentukan pendapatan yang akan digali dan kapan diakui, tergantung pada basis akuntansi yang diadopsi. Basis

¹ Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, Universitas Surabaya

akuntansi yang dimaksud dibagi menjadi empat, yaitu: basis kas, kas yang dimodifikasi, akrual yang dimodifikasi, dan akrual penuh. Basis akuntansi akan mempengaruhi penyajian, isi dan *disclosure* (penyingkapan) dari informasi keuangan yang di dalamnya memuat Pendapatan Daerah yang akan disajikan Pemda.

Basis Kas

Basis kas murni mengenali transaksi dan *event* lainnya dalam periode pelaporan selama kas yang berkaitan dengan transaksi atau *event* telah diterima atau dikeluarkan. Laporan keuangan yang disiapkan menggunakan basis kas mengakui penerimaan dan pembayaran kas selama periode anggaran dan laporan kas saat tanggal pelaporan. Maka, informasi yang didapat dari penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis kas mengindikasikan apakah Pemda telah membelanjakan lebih atau kurang dari yang dikumpulkan selama masa pelaporan tersebut. Akuntansi basis kas mengakui kas masuk sebagai penerimaan tanpa memperhatikan sumber-sumber atau tipenya. Penerimaan pinjaman atau bantuan merupakan pendapatan meskipun keduanya dapat diidentifikasi terpisah dari sumber-sumber pendapatan. Dengan demikian akuntansi basis kas mengakui semua kas masuk tanpa memperhatikan tipenya ketika kas tersebut telah diterima.

Basis Kas yang Dimodifikasi

Basis kas yang dimodifikasi mengakui penerimaan kas masuk yang sama tipenya seperti basis kas. Akan tetapi meliputi jumlah penerimaan dalam periode tertentu (misalnya enam puluh hari) setelah tanggal pelaporan yang berhubungan dengan *event* yang terjadi dalam periode pelaporan. Jumlah

yang diterima tersebut dapat diakui sebagai kas yang diterima dimuka atau hanya diakui sebagai kas saja sebagai penyederhanaan transaksi. Selanjutnya, dibawah basis kas yang dimodifikasi penerimaan dapat diklasifikasikan sebagai pokok sumber utama dari tipe aliran kas. Misalnya transaksi keuangan yang melibatkan penerimaan pinjaman dan pembayaran dapat diklasifikasikan terpisah dari transaksi lain, pembiayaan modal dapat dibedakan dari modal saat ini, dan pembayaran transfer seperti bantuan atau sumbangan dapat dibedakan dari pembelanjaan atas biaya-biaya operasional.

Basis Akrual yang Dimodifikasi

Basis akuntansi akrual yang dimodifikasi mengakui aset finansial sebagaimana aliran kas masuk. Aset finansial adalah: kas, hak kontrak untuk menerima kas atau aset finansial lainnya dari pihak lain, hak kontrak untuk menukarkan instrumen finansial dengan pihak lain dibawah kondisi yang diinginkan, dan instrumen ekuitas dari pihak lain. Basis akuntansi akrual yang dimodifikasi secara umum tidak membolehkan aliran masuk finansial sebagai pendapatan, meskipun akan meliputi hasil penuh (*full proceeds*) penjualan aset non-finansial sebagai pendapatan.

Terdapat standar yang berbeda dalam identifikasi kriteria tentang kapan pendapatan diakui dibawah basis akrual yang dimodifikasi. Misalnya, Pemerintah Kanada, merekomendasikan bahwa pendapatan ketika dapat diukur, diakui dalam periode waktu dimana terdapat transaksi atau kejadian yang akan meningkatkan pendapatan (PSAR bagian 1500, paragraph 81). Di Amerika, kriteria dari *Governmental Accounting Standards Board* (GASB) lebih berkaitan dengan kapan aliran kas terjadi. Dibawah GASB, basis akrual yang dimodifikasi memerlukan

pendapatan dari penilaian pembayar pajak (di Indonesia dapat diwakili oleh badan pengawas atau DPRD) untuk diakui dalam periode akuntansi dimana mereka menjadi terukur dan "ada" untuk pembelanjaan dari tahun fiskal yang berjalan. Artian "ada" disini bahwa pendapatan dapat dikumpulkan dalam periode akuntansi saat ini atau segera setelahnya (misalnya dalam enam puluh hari) untuk digunakan membayar kewajiban (misalnya hutang) dalam periode akuntansi yang sedang berjalan (Pernyataan GASB No 22).

Laporan keuangan yang disiapkan dengan menggunakan basis akuntansi akrual yang dimodifikasi berfokus pada pelaporan hutang neto atau *net debt* (perbedaan antara aset finansial dan kewajiban) dan perubahan yang terjadi diantaranya. Pengertian aset finansial yang diadopsi akan mempengaruhi konsep dari *net debt* yang dilaporkan. Dalam kondisi tertentu, secara umum penggunaan *net debt* dapat menjadi bentuk yang positif.

Apapun konsep *net debt* yang diadopsi, pernyataan finansial dapat dibentuk untuk membedakan antara aliran masuk "kapital" dan "pendapatan" dan dampak aliran masuk tersebut dalam hutang jangka pendek atau jangka panjang. Sehingga perpindahan dari sistem berbasis kas menuju sistem berbasis akrual penting untuk dapat membedakan pendapatan dari peningkatan lain dalam aset neto (contohnya ketika entitas suatu Pemda, misalnya Dinas Kesehatan, menerima bantuan modal dari Pemda).

Basis Akrual Penuh

Basis akuntansi akrual penuh mengakui efek dari transaksi dan kejadian lain selama periode akuntansi yang sedang berjalan, tanpa memperhatikan kapan kas diterima. Pernyataan finansial yang disiapkan dengan menggunakan basis akuntansi akrual penuh mengakui semua aset (termasuk aset fisik), kewajiban, aset neto

atau ekuitas, pendapatan dan pengeluaran/belanja dari suatu entitas.

Pendapatan tidak dipertimbangkan sebagai aliran masuk finansial. Keuntungan atau kerugian dari penjualan dari aset finansial atau aset non-finansial diakui sebagai hasil bersih dari nilai buku aset yang dijual tersebut. Akuntansi basis akrual mencoba untuk mengakui kejadian dalam periode waktu dimana transaksi terjadi sehingga dimungkinkan untuk tidak merealisasikan keuntungan (misalnya peningkatan dalam nilai aset, peningkatan yang disebabkan oleh pertumbuhan hasil hutan atau peternakan) diantara pendapatan. Hal ini bergantung pada apakah terealisasi atau tidak pendapatan dari periode akuntansi yang berjalan.

PENDAPATAN BERBASIS AKUNTANSI AKRUAL YANG DIMODIFIKASI

Fokus tulisan ini adalah definisi dan pengakuan pendapatan di bawah basis akuntansi akrual yang dimodifikasi dan kategori pendapatan. Selanjutnya perlu ditegaskan bahwa penerimaan dan pengeluaran kas dibawah basis akuntansi akrual yang dimodifikasi diakui saat penerimaan dan pengeluaran kas tersebut telah diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain pengakuan pendapatan dalam akuntansi berbasis akrual yang dimodifikasi sama dengan metode akuntansi basis kas.

Pengertian Pendapatan

Pendapatan (*revenue*) dan keuntungan (*gain*) adalah termasuk dalam *income*. *Income* adalah peningkatan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk aliran masuk atau peningkatan aset atau penurunan dari kewajiban yang menghasilkan peningkatan ekuitas (Kerangka Kerja *International Accounting*

Standards Committee). Pendapatan antara lain penjualan barang, pemberian jasa, penggunaan aset dengan imbalan royalti, dan pembagian keuntungan atau *gain* (*International Accounting Standard 18*). Barang yang dijual meliputi barang yang diproduksi untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali, seperti tanah dan properti lain yang dimiliki Pemda untuk dijual kembali atau disewakan.

Pernyataan "keuntungan atau *gain*" menunjukkan item-item lain diluar pendapatan (*revenue*) yang merupakan *income*. Keuntungan dapat terjadi atau tidak terjadi dalam aktivitas Pemda. Keuntungan dapat terjadi misalnya pada peningkatan nilai revaluasi aset jangka panjang (misalnya obligasi, tanah, gedung), tetapi hal ini harus dibuat kesepakatan diantara Pemda sebagai pelaksana program dan DPRD sebagai badan pengawas tentang konsep pendapatan sehingga keuntungan (*gain*) dan pendapatan (*revenue*) dapat dianggap sebagai pendapatan saja. IASC menyatakan bahwa pendapatan (*revenue*) dan keuntungan (*gain*) dianggap sebagai pendapatan (*income*).

Dalam kasus tertentu, Pemda akan memberikan harga untuk suatu produk atau jasa yang tidak berkaitan dengan biaya penyediaan barang atau jasa atau tidak berkaitan dengan kesediaan masyarakat untuk membayar. Harga dapat diberikan dibawah harga wajar bila Pemda mempunyai tujuan sosial, misalnya penyediaan jasa kesehatan (PUSKESMAS) atau jasa pendidikan sekolah dasar negeri yang murah. Selain itu, tujuan lain adalah untuk subsidi. Jika Pemda menggunakan kekuatan monopoli (menarik biaya untuk mengeluarkan ijin usaha, ijin IMB, atau paspor) maka klasifikasi transaksi diakui sebagai pajak. Imbal jasa atau *fee* dari aktivitas monopoli harus diperlakukan sebagai pendapatan. Pendapatan Pemda dari yang bukan pokok atau transaksi insidental (misalnya penjualan aset tetap, seperti kendaraan dinas, tanah, dan sebagainya) harus diakui secara terbuka.

Pendapatan yang diungkapkan diatas merupakan pendapatan yang mirip dengan aktivitas sektor swasta sedangkan pada umumnya pendapatan Pemda berasal dari: pajak, bunga, laba BUMD, retribusi, denda, sumbangan, dan hasil alam.

Pendapatan Timbal Balik

Transfer timbal balik adalah jika suatu entitas menerima aset atau jasa atau mempunyai kewajiban yang tidak langsung tidak sama dengan nilai dalam pertukaran tersebut. Pajak merupakan sumber utama aliran masuk manfaat ekonomi. Pembayar pajak tidak langsung dapat merasakan manfaatnya sebesar jumlah pajak yang dibayarkannya, tetapi dari kumpulan pajak tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk, misalnya pengerasan jalan raya.

Tujuan utama Pemda bukan untuk memaksimalkan pendapatan dan keuntungan. Pendapatan adalah sarana bagi Pemda untuk mencapai tujuan bagi kesejahteraan sosial atau masyarakat yang dipimpinnya. Untuk itu sebagian besar pendapatan Pemda adalah dari transaksi timbal balik ini. Selanjutnya, dikarenakan Pemda mempunyai kewenangan untuk menarik pajak maka jumlah pendapatan dari pajak bukanlah merupakan indikator dari keefesienan dan keefektifan aktifitas Pemda.

Penarikan pajak dapat meliputi hal-hal berikut: pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, pajak gaji, pajak properti, pajak perijinan, pajak kendaraan bermotor, dan retribusi.

Pajak merupakan sumber utama dari pendapatan timbal balik. Meskipun Pemda menghasilkan barang dan jasa dari transfer tersebut, namun barang dan jasa tersebut tidaklah disediakan secara langsung dan tidaklah sama nilainya dengan aset yang diberikan atau ditransfer oleh pembayar pajak kecuali adanya kemungkinan kebetulan saja. Pemda tidak diwajibkan untuk menyediakan

barang dan jasa untuk individu tertentu sebagai imbalan atas pembayaran pajak yang dilakukan, melainkan untuk masyarakat secara luas. Manfaat ekonomi yang didapatkan dari pajak adalah kemampuannya untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial dari penyediaan jasa dan barang tersebut bagi masyarakat.

Pengakuan Pendapatan

Jika suatu item telah didefinisikan sebagai pendapatan, selanjutnya yang harus diperhatikan adalah kapan pendapatan tersebut diakui. Masyarakat dan DPRD memandang perbedaan antara pendapatan dan belanja dan/atau pengeluaran sebagai aspek penting dari kinerja keuangan Pemda. Ekuitas dalam suatu periode akuntansi merupakan hal yang penting dalam akuntansi sektor publik. Ekuitas dalam periode akuntansi atau sering disebut periode anggaran merefleksikan keseimbangan anggaran yang disyaratkan. Sementara itu, informasi non-finansial bersama-sama biaya, menyediakan indikator dari kinerja Pemda. Kemudian, perbedaan antara pendapatan dan belanja mengindikasikan keefektifan dan keefisienan pengelolaan ekuitas dalam satu periode anggaran. Dengan demikian pengakuan pendapatan merupakan hal yang penting dalam penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kriteria pengakuan pendapatan dibawah basis akuntansi akrual yang dimodifikasi telah dipahami pada pembahasan sebelumnya di atas. Meskipun demikian Pemda harus menyadari kemampuannya untuk mempengaruhi *timing* aliran kas masuk (kapan aliran kas terjadi), apakah basis akrual yang dimodifikasi tersebut menyediakan informasi yang lebih bermanfaat atau tidak.

Secara umum, kriteria pengakuan pendapatan adalah: kemungkinan bahwa aliran kas masuk akan terjadi, dan aliran

masuk tersebut dapat diukur secara handal atau dapat dipercaya. Pernyataan "kemungkinan" dapat diartikan bahwa perubahan aliran kas masuk adalah lebih banyak bukan lebih sedikit. Ada kemungkinan akan tergantung pada penilaian dari derajat kepastian yang mengikuti pendapatan dalam kondisi tertentu harus dibuat berdasarkan basis ketersediaan bukti. Kemudian, item pendapatan harus dapat diukur dengan derajat keandalan yang tinggi pula.

Pernyataan Konsep Akuntansi Keuangan nomor 5 yang diterbitkan oleh *Financial Accounting Standards Board (FASB)* menyatakan bahwa pengakuan pendapatan meliputi dua faktor, yaitu:

1. Terealisasi atau dapat direalisasikan, pendapatan dapat direalisasikan ketika jasa atau barang perdagangan atau aset lain dapat ditukarkan dengan kas. Selain itu juga bahwa pendapatan dapat direalisasikan ketika aset yang diterima atau dipegang siap dikonversikan untuk mengetahui jumlah kasnya.
2. Dihasilkan, suatu aktivitas pendapatan dari suatu entitas melibatkan produksi atau *delivery* barang atau jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama dan pendapatan disadari telah didapatkan saat entitas telah menyelesaikan kewajibannya untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Pengalaman di Amerika Serikat, pengakuan pendapatan pajak dan pendapatan bukan hasil aktifitas pertukaran (perdagangan) adalah ketika suatu pelaporan entitas dibuat secara spesifik dapat diidentifikasi, secara legal dapat mengklaim sejumlah kas atau aset lainnya. Pendapatan jenis ini akan memunculkan permasalahan disekitar pengumpulan

karena keterbatasan informasi, misalnya berapa sebenarnya jumlah wajib pajak di suatu daerah.

Klasifikasi Pendapatan

Ada beberapa sistem untuk mengklasifikasikan aliran kas masuk untuk keperluan analisis ekonomi. Misalnya sistem yang berlaku di Amerika, yaitu *United Nations' System of National Accounts* (SNA). Selain itu, IMF juga mengembangkan *the International Monetary Fund's Government Finance Statistic* (GFS), dan Uni Eropa mengembangkan sistem yang disebut *the European System of National and Regional Accounts* (ESA).

Sebagai informasi tambahan, berikut ini dijelaskan secara singkat sistem-sistem tersebut. Rerangka SNA digunakan untuk analisis ekonomi untuk mengukur aktivitas dalam sektor ekonomi. SNA menyediakan informasi pada konsumsi pemerintah, investasi, tabungan dan pinjaman neto, yang semuanya relevan dengan analisis kebijakan fiskal dan implikasinya pada ekonomi makro. Sedangkan, klasifikasi IMF menyediakan gambaran yang secara internasional dapat dibandingkan. Sistem IMF tersebut berbasis kas, tidak mengizinkan depresiasi pada aset non-kas, tetapi pendapatan dan belanja dipisahkan dalam aliran modal dan aliran lancar.

Laporan finansial untuk Pemda disiapkan dengan metode basis akrual yang dimodifikasi menyediakan informasi posisi keuangan Pemda dan kinerja operasi (surplus/defisit) dari aktivitas Pemda selama tahun anggaran. Informasi dari pendapatan bersama-sama dengan informasi belanja adalah sangat penting untuk menilai apakah Pemda telah mengelola ekuitas atau modalnya secara baik dan untuk mengetahui kemampuan pendanaan Pemda untuk aktivitasnya. Mengklasifikasikan pendapatan dalam beberapa klasifikasi dapat

membantu DPRD untuk menentukan ketergantungan Pemda terhadap sumber-sumber pendapatan tertentu, misalnya Pemda memperoleh pendapatan terbesar dari sektor pengelolaan hasil alam, sedangkan Pemda lainnya memperoleh pendapatan terbesar dari pajak badan usaha. Hal ini akan membantu menentukan pengelolaan keuangan, khususnya pendapatan secara lebih efektif.

Selanjutnya, diperlukan sekali untuk membedakan transaksi keuangan dari transaksi lainnya dalam laporan arus kas. Penerimaan merupakan sumber utama dari aliran arus kas. Laporan arus kas secara umum mengklasifikasikan penerimaan kas dan pembayaran kas dari aktifitas operasi, investasi dan pendanaan. Pertanyaan selanjutnya yang timbul adalah apakah penerimaan pajak diklasifikasikan dalam aliran kas operasi atau pendanaan.

International Accounting Standard no 7, dalam Laporan Arus Kas mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Aktifitas operasi adalah pendapatan pokok dari aktifitas pendapatan-produksi dari suatu entitas (sektor publik) dan aktivitas lain yang bukan aktivitas pendanaan atau investasi.
2. Aktifitas investasi adalah akuisisi dan pembagian atas aset jangka panjang dan investasi lain yang bukan setara kas.
3. Aktifitas pendanaan adalah aktifitas hasil dari pertukaran dalam ukuran dan komposisi dari ekuitas modal dan pinjaman entitas (sektor publik).

Mengacu pada pengertian diatas, maka penerimaan pajak akan diklasifikasikan sebagai aliran kas operasi yang diturunkan dari aktifitas pokok pendapatan-produksi Pemda.

Tipe utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan Pertukaran dan Keuntungan
 - a. Keuntungan dan Pendapatan yang Disadari, terdiri dari: penjualan, bunga, laba BUMD, royalti, dan keuntungan penjualan aset.
 - b. Keuntungan yang Tidak Diduga, terdiri dari: keuntungan pertukaran dengan mata uang asing, kenaikan nilai pasar dari aset, dan peningkatan pertumbuhan hasil alam, misalnya pertumbuhan hasil hutan.
2. Pendapatan dari Penggunaan Kewenangan, terdiri dari: pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak upah/gaji, pajak tembakau/rokok, pajak impor, biaya perijinan, dan pajak keuntungan hak monopoli yang diberikan kepada badan usaha atau pihak lain.

Selain jenis pendapatan diatas, Pemda dapat mengembangkannya sesuai dengan kondisi di masing-masing Pemda. Pendapatan yang disebutkan diatas harus diperkuat dengan kekuatan hukum, yaitu peraturan daerah (PERDA) yang disepakati oleh DPRD.

Selanjutnya, IMF mempunyai cara tersendiri untuk mengklasifikasikan pendapatan (diambil yang disesuaikan dengan PAD), yaitu:

1. Pendapatan Pajak, yaitu (1) Pajak atas *income*, keuntungan dan *capital gain*, terdiri dari: pajak individual, perusahaan, atau entitas lainnya, (2) Pajak atas gaji/upah, (3) Pajak properti, terdiri dari: pajak atas properti tak bergerak, pajak atas kekayaan bersih perusahaan, individu, atau pajak perumahan, (4) Pajak Domestik atas barang dan jasa, terdiri dari: pajak penjualan, *turnover*, dan pertambahan nilai, pajak tembakau/rokok, pajak

keuntungan hak monopoli yang diberikan kepada suatu badan usaha atau pihak lainnya, pajak ijin usaha, pajak kendaraan bermotor, pajak atas barang atau jasa, dan (5) Pajak atas perdagangan internasional, terdiri dari: pajak impor dan pajak keuntungan transaksi mata uang asing.

2. Pendapatan Bukan Pajak, yaitu (1) Pendapatan properti dan usaha, terdiri dari: laba operasi BUMD atau pendapatan properti, (2) *Fee* administrasi dari penjualan insidental, (3) Denda, dan (4) Kontribusi dana pensiun.
3. Pendapatan Modal, yaitu (1) Penjualan dari aset tetap, (2) Penjualan saham BUMD, (3) Penjualan tanah, dan (4) Transfer modal dari sumber bukan pemerintah.

KESIMPULAN

Dalam penggalian Pendapatan Asli Daerah, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali dan menentukan item-item yang akan menjadi pendapatan. Hal ini dapat dilakukan dengan metode *brainstorming* antara Pemda dengan DPRD yang bertujuan untuk mendapatkan masukan tentang item-item mana yang memungkinkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Hal ini tentunya dengan mempertimbangkan kemampuan dan potensi daerah.

Selanjutnya, setelah mengetahui item mana yang akan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah, maka pengguna harus menentukan basis akuntansi yang akan digunakan. Sebab, basis akuntansi akan menentukan kapan suatu pendapatan diakui. Kemudian, basis akuntansi ini akan menentukan kinerja Pemda pada suatu periode anggaran. Basis akuntansi yang disarankan disini adalah basis akuntansi akrual yang dimodifikasi, sebab basis akuntansi ini menyediakan informasi yang

lebih transparan dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap selanjutnya, setelah daerah mengenali item pendapatan dan basis akuntansi yang digunakan, maka dalam pelaksanaannya diperlukan perangkat peraturan daerah (PERDA) sebagai pedoman dalam melakukan pengakuan pendapatan ini. Sehingga Pemda akan jelas dasar hukumnya dalam menentukan pendapatan apa saja yang merupakan sumber potensi daerahnya. PERDA ini dibutuhkan terutama dalam penarikan pajak. Kemudian penting juga untuk mengeluarkan PERDA tentang penggalan sumber-sumber hasil alam mengingat hasil alam merupakan aset yang terbatas.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan penggalan pendapatan yang sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pemda dimungkinkan untuk mendapat surplus/defisit dari operasi badan usaha, pajak, dan item-item pendapatan lainnya. DPRD selaku badan pengawas bertindak untuk mengawasi pelaksanaan anggaran daerah yang telah disusun pada awal periode anggaran sebelumnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Accounting Standards Board, 1992. **Statement of Principles Discussion Draft.**
- Canadian Institute of Chartered Accountant, 1990. **Public Sector accounting and Auditing Handbook, Section PS 1500, General Standard of Financial Statement Presentation - Federal, Provincial and Territorial Governments.**
- Chartered Institute of Public Finance and Accountancy, 1994. **Code of Accounting Practice on Local Authority Accounting in Great Britain.**
- Financial Accounting Standards Board, 1984. **SFAC 5, Recognition and Measurement in Financial Statements of Business Enterprises.**
- Government Accounting Standards Board, 1990. **Statement 11, Measurement Focus and Basis of Accounting - Government Fund Operating Statements.**
- Government Accounting Standards Board, 1993. **Statement 22, Accounting for Taxpayer-Assessed Tax Revenues in Governmental Funds.**
- International Accounting Standards Committee, 1989. **Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements.**
- International Accounting Standards Committee, 1994. **International Accounting Standards 7 Cash Flow Statements.**
- International Accounting Standards Committee, 1995. **International Accounting Standards 18 Revenues.**
- International Monetary Fund, **A Manual on Government Financial Statistics.**
- New Zealand Society of Accountants, 1993. **Statement of Concepts for General Purpose Financial Reporting.**
- Public Sector Committee, 1993. **Elements of the Financial Statements of National Governments, study number 2, International Federation of Accountants.**
- Public Sector Committee, 1994. **Implementing Accrual Accounting in Government: The New Zealand Experience, International Federation of Accountants.**
- Public Sector Committee, 1996. **Definition and Recognition of Revenues, study number 9, International Federation of Accountants.**
- Public Sector Committee, 1996. **Perspectives on Accrual Basis, occasional paper number 3, International Federation of Accountants.**

Public Sector Committee, 2003. **Handbook of International Public Sector Accounting Standards**, International Federation of Accountants.

Public Sector Committee, 2003. **Financial Reporting under the Cash Basis of Accounting**, International Public Sector Accounting Standard.